



WALI KOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALI KOTA BATAM
NOMOR 51 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATAM,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singgingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singgingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang. . .

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2024 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
14. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Thaun 2019 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Batam Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 6);
16. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 44 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2026 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2025 Nomor 1614);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Batam.
3. Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2026 yang selanjutnya disebut RKPD Kota Batam Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA-Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
8. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah otonom untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

BAB II
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
Pasal 2

- (1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 merupakan penjabaran Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, RKPD Tahun 2026, kondisi lingkungan strategis Daerah dan hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Triwulan II tahun 2025.
- (2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I PENDAHULUAN
 - b. BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025
 - c. BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
 - d. BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
 - e. BAB V PENUTUP

Pasal 3

Penjabaran Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan menjadi Lampiran I sampai dengan Lampiran XLV dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 4

Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi:

- a. acuan penyusunan RKA-Perangkat Daerah;
- b. landasan penyusunan KUA dan PPAS untuk menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026; dan
- c. bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah telah disusun berlandaskan RKPD.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar. . .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 18 SEPTEMBER 2025

WALI KOTA BATAM,

AMSAKAR ACHAMAD

Diundangkan di Batam
pada tanggal 18 SEPTEMBER 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM,

FIRMANSYAH

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2025 NOMOR 1621

LAMPIRAN VIII : PERATURAN WALI KOTA BATAM
NOMOR : 51 TAHUN 2025
TENTANG : RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH TAHUN 2026





RENCANA KERJA

RENJA TAHUN 2026

BPBD KOTA BATAM

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA BATAM



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Batam Tahun 2026.

Rencana Kerja (Renja) adalah dokumen perencanaan kerja perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja (Renja) memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan arah sekaligus pedoman bagi seluruh jajaran pejabat dan staf di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Batam dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan di urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Bencana dan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Batam Tahun 2026.

Semoga Rencana Kerja (Renja) ini dapat dipedomani oleh seluruh pejabat dan staf di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Batam dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat guna menukseskan visi dan misi Pemerintah Kota Batam

Batam 10 September 2025

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kota Batam,



Agis Bendri, S.T.

NIP 19690323 200003 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.1.1 Pengertian Renja Perangkat Daerah.....	1
1.1.2 Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah	1
1.1.3 Keterkaitan Antara Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	2
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	17
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	22
2.3.1 Tingkat Kinerja Perangkat Daerah	22
2.3.2 Permasalahan dan Hambatan	22
2.3.3 Peluang dan Tantangan	24
2.3.4 Isu-Isu Penting/Strategis Pelayanan Perangkat Daerah	25
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	26
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	44
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	45
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	45
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	46
3.3 Program dan Kegiatan	47
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .	68
BAB V PENUTUP	73
5.1 Catatan Penting	73
5.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan	73
5.3 Rencana Tindak Lanjut	74

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 Kota Batam	8
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan PD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Batam	18
Tabel 2.3	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026	27
Tabel 2.4	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026	44
Tabel 3.1	Target Tujuan dan Sasaran BPBD Tahun 2026	47
Tabel 3.2	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan PD	49
Tabel 3.3	Program dan Kegiatan BPBD	69

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Tahapan Penyusunan Renja	2
Gambar 1.2	Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	2

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan Pembangunan Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah, sehingga dengan Undang-undang ini kita mengenal satu bagian penting dari perencanaan daerah yaitu rencana pembangunan daerah.

1.1.1 Pengertian Renja Perangkat Daerah

Rencana pembangunan daerah terdiri atas RPJPD, RPJMD, dan RKPD sedangkan Rencana Perangkat Daerah terdiri atas Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Batam yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renja menjadi jembatan antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan tahunan. Di dalam Renja berisikan juga evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Bencana, strategi, program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditransformasikan melalui Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

1.1.2 Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Renja disusun dengan tahapan sebagaimana tergambar pada alur sebagai berikut:

- a. Persiapan penyusunan Renja
- b. Penyusunan Rancangan Awal Renja
- c. Penyusunan Rancangan Renja
- d. Pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah
- e. Perumusan Rancangan Akhir Renja
- f. Penetapan Renja.

Renja Perangkat Daerah memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Program dan kegiatan dimaksud meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja, dan kelompok sasaran yang menjadi bahan utama RKPD, serta menunjukkan prakiraan maju.

Gambar 1.1 Tahapan Penyusunan Renja

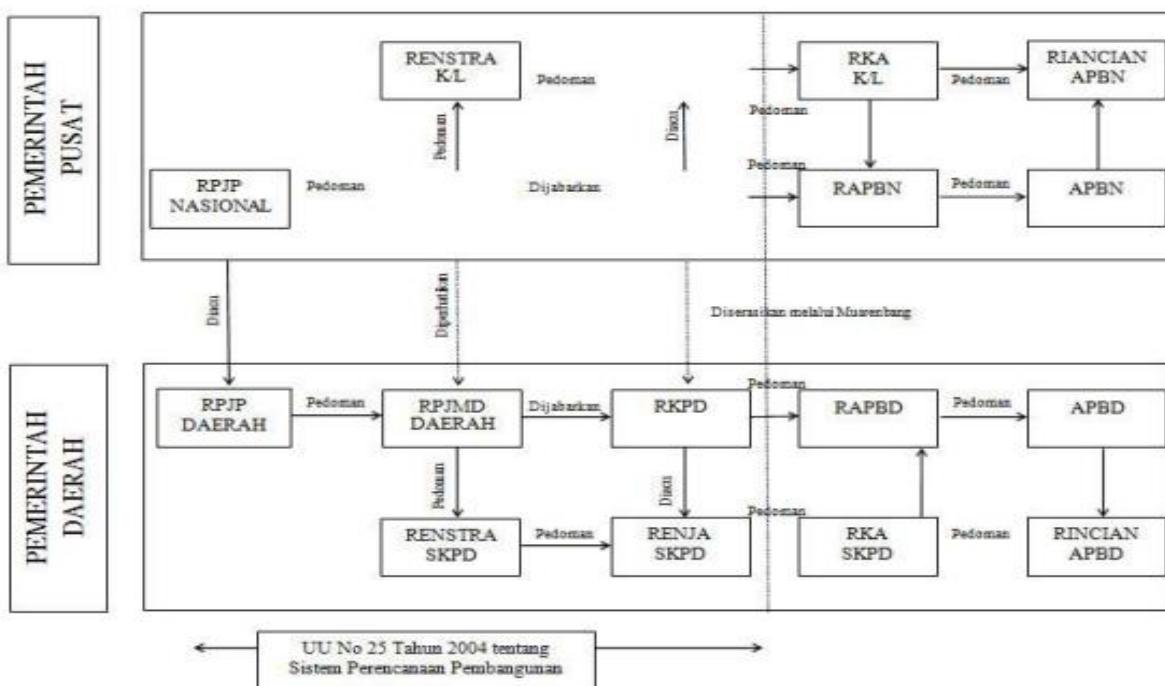


1.1.3 Keterkaitan Antara Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Renja Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan tahunan harus disusun dengan berpedoman pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan Pemerintah Daerah, dan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, yang merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan. Renstra Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan daerah. Selanjutnya Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam menyusun RKA sebelum ditetapkan menjadi APBD.

Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 1.2 Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan hukum Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Batam dalam menyusunan Rencana Kerja Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
9. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 130);
10. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2025 -

- 2029 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 136);
11. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 206 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2025 Nomor 1605);
 12. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 44 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2026 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2025 Nomor 1614);
 13. Peraturan Wali Kota Batam Nomor Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2025 Nomor).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan tahun 2026, dan memberi gambaran perencanaan program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sesuai tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2026.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Batam ini adalah untuk mensinergikan program dan kegiatan yang ada di Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Batam dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam dalam dokumen perencanaan daerah (RKPD) Tahun 2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Perangkat Daerah meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan latar belakang penulisan (1.1), dasar hukum (1.2), maksud dan tujuan (1.3), dan sistematika penulisan (1.4).

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

Menguraikan tentang evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun lalu (2.1), analisis kinerja pelayanan perangkat daerah (2.2), isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah (2.3), review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) (2.4) dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat (2.5).

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Menguraikan tentang telaahan terhadap kebijakan nasional (3.1). tujuan dan sasaran Renja perangkat daerah (3.2), program dan kegiatan (3.3) yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai target sasaran kinerja Rencana Strategis (Renstra) untuk Tahun (n) yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah Tahun (n).

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Memuat rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah Tahun 2026

BAB V PENUTUP

Menguraikan tentang kesimpulan, catatan penting, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Evaluasi terhadap Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Batam tahun 2025 meliputi 3 (tiga) hal yaitu kebijakan perencanaan program dan kegiatan, pelaksanaan rencana program dan kegiatan, dan hasil rencana program dan kegiatan.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Batam mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan sebagaimana Tabel 2.1 dengan uraian penjelasan sebagai berikut:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Target indikator sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 Yaitu 50% dengan capaian realisasi/capaian indikator hingga triwulan II yaitu sebesar 2,15%.
 - b. Program Penanggulangan Bencana Target indikator sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 Yaitu 50% dengan belum ada realisasi/capaian indikator hingga triwulan II.
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
 - Belum ada Program dan Kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran, dan direncanakan akan dilaksanakan realisasi pemuatan target yang telah ditetapkan pada triwulan III dan IV.
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
 - Belum ada Program dan Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran, dan direncanakan akan dilaksanakan realisasi pemuatan target yang telah ditetapkan pada triwulan III dan IV.
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan
 - a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Batam baru efektif berjalan pada bulan Mei 2025. Hal ini berdampak pada keterlambatan perencanaan detail, penyesuaian struktur organisasi, dan penguatan tata kelola kelembagaan.
 - b. Dengan efektif berjalan pada pertengahan tahun, waktu pelaksanaan program dan kegiatan pada Triwulan I dan II tidak dapat optimal sehingga realisasi kinerja menjadi sangat rendah.
 - c. Tahapan penyesuaian anggaran, penataan program, serta administrasi kelembagaan membutuhkan waktu, sehingga implementasi program tertunda.

- d. Masih terbatasnya jumlah dan kompetensi aparatur di bidang penanggulangan bencana serta perlunya penyesuaian koordinasi lintas perangkat daerah turut menghambat percepatan realisasi program.
- 5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 - a. Mengingat Renstra BPBD menargetkan peningkatan kapasitas penanggulangan bencana secara bertahap setiap tahun, keterlambatan realisasi di awal periode dapat memengaruhi akumulasi capaian pada tahun-tahun berikutnya.
 - b. Rendahnya capaian indikator kinerja pada tahun pertama operasional dapat berdampak pada evaluasi kinerja perangkat daerah dalam sistem akuntabilitas kinerja pemerintah (SAKIP).
 - c. Percepatan realisasi pada Triwulan III dan IV berpotensi menimbulkan beban kerja yang tinggi, berisiko menurunkan kualitas pelaksanaan program dan kegiatan.
 - d. Untuk mengantisipasi ketertinggalan, BPBD perlu melakukan optimalisasi perencanaan ulang, penguatan koordinasi dengan perangkat daerah terkait, serta percepatan pelaksanaan program strategis pada sisa waktu tahun berjalan.

Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Batam sampai dengan tahun 2025 adalah sebagaimana tersebut dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2. 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025

Nama Perangkat Daerah : Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Batam

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat) Daerah Tahun 2025	Perkiraaan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Urusan : Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat									
	Bidang Urusan: Bencana									
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Pelayanan Kesekretaritan (Dengan Satuan:Nilai)	89 (Nilai)	N/A	N/A	N/A	N/A	85 (Nilai)	-	-
		Nilai SAKIP PD (Dengan Satuan:Nilai)	79 (Nilai)	N/A	N/A	N/A	N/A	70,13 (Nilai)	-	-
1	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan	100 Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	100 Persen	100 Persen	100
1	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	114 Orang/bulan	N/A	N/A	N/A	N/A	19 Orang/bulan	13 Orang/bulan	0.11

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat) Daerah Tahun 2025	Perkiraaan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	Sub Kegiatan : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	6 Dokumen	6 Dokumen	50
2	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	100 Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	60 persen	60 persen	100
3	Sub Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 paket	N/A	N/A	N/A	N/A	1 paket	1 paket	100
3	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100 persen	N/A	N/A	N/A	N/A	100 persen	100 persen	100
4	Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	N/A	N/A	N/A	N/A	1 Paket	1 Paket	100
5	Sub Kegiatan : Penyediaan	Jumlah Paket Peralatan dan	1 Paket	N/A	N/A	N/A	N/A	1 Paket	1 Paket	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat) Daerah Tahun 2025	Perkiraaan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)			
	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Perlengkapan Kantor yang Disediakan								
6	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-	-
7	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	N/A	N/A	N/A	N/A	1 Paket	1 Paket	100
8	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	12 Laporan	12 Laporan	100
4	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan	100 persen	N/A	N/A	N/A	N/A	100 persen	100 persen	100
9	Sub Kegiatan : Pengadaan	Jumlah Unit Kendaraan	1 Unit	N/A	N/A	N/A	N/A	1 Unit	1 Unit	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat) Daerah Tahun 2025	Perkiraaan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		
	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan							
10	Sub Kegiatan : Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	12 Unit	N/A	N/A	N/A	N/A	1 Unit	1 Unit
11	Sub Kegiatan : Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	292 Unit	N/A	N/A	N/A	N/A	146 Unit	146 Unit
12	Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	66 Unit	N/A	N/A	N/A	N/A	37 Unit	37 Unit
13	Sub Kegiatan : Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	N/A	N/A	N/A	N/A	1 Unit	100
14	Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana	35 Unit	N/A	N/A	N/A	N/A	7 Unit	7 Unit

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat) Daerah Tahun 2025	Perkiraaan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)			
	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan								
5	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100 persen	N/A	N/A	N/A	N/A	100 persen	100 persen	100
15	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	12 Laporan	12 Laporan	100
16	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	12 Laporan	12 Laporan	100
6	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik	Persentase Barang Milik Daerah yang	100 persen	N/A	N/A	N/A	N/A	100 persen	100 persen	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat) Daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)			
	Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	dipelihara dan berfungsi dengan baik								
17	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	N/A	N/A	N/A	N/A	1 unit	1 unit	100
II	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	100 persen	N/A	N/A	N/A	N/A	100 persen	100 persen	100
		Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	100 persen	N/A	N/A	N/A	N/A	100 persen	100 persen	100
		Persentase Penanganan Pasca Bencana	100 persen	N/A	N/A	N/A	N/A	100 persen	100 persen	100
7	Kegiatan : Pelayanan	Jumlah Dokumen	12 Dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	12 Dokumen	12 Dokumen	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>)/ Kegiatan (<i>Output</i>) / Sub Kegiatan (<i>Sub Output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat) Daerah Tahun 2025	Perkiraaan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)			
	Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kota/ Kota								
18	Sub Kegiatan : Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kot a yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	100 Orang	N/A	N/A	N/A	N/A	100 Orang	100 Orang	100
19	Sub Kegiatan : Penyusunan Kajian Risiko	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana	1 Dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	1 Dokumen	1 Dokumen	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat) Daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		
	Bencana Kabupaten/Kota	(KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun							
8	Kegiatan : Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Presentase cakupan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan	100 persen	N/A	N/A	N/A	N/A	100 persen	100 persen
20	Sub Kegiatan : Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	150 Keluarga	N/A	N/A	N/A	N/A	100 Keluarga	100 Keluarga
21	Sub Kegiatan : Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kot a yang mengikuti pelatihan	64 Kawasan	N/A	N/A	N/A	N/A	25 Kawasan	25 Kawasan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat) Daerah Tahun 2025	Perkiraaan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		
		pencegahan dan mitigasi bencana							
9	Kegiatan : Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Presentase cakupan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100 persen	N/A	N/A	N/A	N/A	100 persen	100 persen
22	Sub Kegiatan : Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	45 Orang	N/A	N/A	N/A	N/A	10 Orang	10 Orang

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah berisikan capaian kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018.

Indikator kinerja kunci Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Batam Tahun 2025 adalah sebagaimana tabel dibawah ini:

**Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Batam**

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	
1	Indeks Risiko Bencana	-	-	N/A	101,89	100,96	100,04	108,89	-	100,96	100,04	-
2	Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Kebencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	N/A	73	75	77	N/A	-	75	77	-
3	Indeks Ketahanan Daerah	-	-	N/A	0,27	0,29	0,31	0,27	-	0,29	0,31	-
4	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	-	-	N/A	85	87	88	N/A	-	87	88	-
5	Nilai SAKIP PD	-	-	N/A	70,13	73	75	N/A	-	73	75	-
6	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	-	-	N/A	100	100	100	N/A	-	100	100	-
7	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	-	-	N/A	100	100	100	N/A	-	100	100	-
8	Persentase Penanganan Pasca Bencana	-	-	N/A	100	100	100	N/A	-	100	100	-
9	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	✓	-	N/A	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	
10	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	✓	-	N/A	1 Dokumen	-	-	N/A	1 Dokumen	-	-	
11	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana	✓	-	N/A	-	55 Unit	60 Unit	N/A	-	55 Unit	60 Unit	

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	
	di Kawasan tempat tinggalnya											
12	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsiannya sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota	✓	-	N/A	-	-	200 Orang	N/A	--		200 Orang	
13	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	✓	-	N/A	100 Keluarga	150 Keluarga	150 Keluarga	N/A	150 Keluarga	150 Keluarga	150 Keluarga	
14	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-Kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	✓	-	N/A	-	-	12 Kawasan	N/A	-	-	12 Kawasan	
15	Jumlah personal Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	✓	-	N/A	-	24 Orang	24 Orang	N/A	-	24 Orang	24 Orang	
16	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	✓	-	N/A	-	-	1 Dokumen	N/A	-	-	1 Dokumen	
17	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	✓	-	N/A	-	-	1 Dokumen	N/A	-	-	1 Dokumen	
18	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	✓	-	N/A	-	1 Dokumen	-	N/A	-	1 Dokumen	-	

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	
19	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	√	-	N/A	25 Kawasan	50 Kawasan	64 Kawasan	N/A	50 Kawasan	50 Kawasan	50 Kawasan	
20	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	√	-	N/A	-	3 Dokumen	3 Dokumen	N/A	-	3 Dokumen	3 Dokumen	
21	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	√	-	N/A	10 Orang	30 Orang	35 Orang	N/A	10 Orang	30 Orang	35 Orang	
22	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	√	-	N/A	-	12 Dokumen	12 Dokumen	N/A	-	12 Dokumen	12 Dokumen	
23	Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	√	-	N/A	-	-	1 Dokumen	N/A	-	-	1 Dokumen	
24	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	√	-	N/A	-	-	2 Dokumen	N/A	-	-	3 Dokumen	
25	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	√	-	N/A	-	-	5 Dokumen	N/A	-	-	5 Dokumen	
26	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	√	-	N/A	-	-	4 Dokumen	N/A	-	-	4 Dokumen	
27	Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi	√	-	N/A	-	-	22 Orang	N/A	-	-	22 Orang	

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	
28	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	√	-	N/A	-	-	10 Kegiatan	N/A	-	-	10 Kegiatan	
29	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	-	√	N/A	100 Persen	100 Persen	100 Persen	N/A	100 Persen	100 Persen	100 Persen	
30	Persentase warga negara dan aparatur yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	-	√	N/A	100 Persen	100 Persen	100 Persen	N/A	100 Persen	100 Persen	100 Persen	
31	Persentase jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	-	√	N/A	100 Persen	100 Persen	100 Persen	N/A	100 Persen	100 Persen	100 Persen	
32	Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	-	√	N/A	35 Persen	75 Persen	100 Persen	N/A	35 Persen	75 Persen	100 Persen	
33	Persentase penanganan pra bencana	-	√	N/A	100 Persen	100 Persen	100 Persen	N/A	100 Persen	100 Persen	100 Persen	
34	Persentase penanganan pasca bencana	-	√	N/A	100 Persen	100 Persen	100 Persen	N/A	100 Persen	100 Persen	100 Persen	
35	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	-	√	N/A	100 Persen	100 Persen	100 Persen	N/A	100 Persen	100 Persen	100 Persen	
36	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	-	√	N/A	100 Persen	100 Persen	100 Persen	N/A	100 Persen	100 Persen	100 Persen	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.3.1 Tingkat Kinerja Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembentukan Perangkat Daerah dan Peraturan Wali Kota Batam Nomor 18 tahun 2024 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, dan Sistem Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024, bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas :

- a. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. Melaksanakan penyelenggaraan bencana pada wilayahnya;
- f. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Wali Kota setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- g. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- h. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBD; dan
- i. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan Tugas Pokok dimaksud, Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan penanggulangan bencana daerah
2. Pemantauan
3. Evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

2.3.2 Permasalahan dan Hambatan

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Batam, tentu tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi, baik dalam peningkatan kinerja maupun kinerja pelayanan. Faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan-permasalahan tersebut, dapat dikategorikan dalam dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

A. Permasalahan Internal

1. BPBD Kota Batam baru efektif berjalan pada Mei 2025, sehingga terdapat keterbatasan waktu untuk menyiapkan pedoman, standar

- operasional, maupun peta rawan bencana yang menjadi dasar pelaksanaan program.
2. Meskipun telah terbentuk bidang-bidang (Pencegahan, Kedaruratan dan Logistik, Rehabilitasi dan Rekonstruksi), namun fungsi koordinasi antarbidang masih dalam tahap penyesuaian. Hal ini memengaruhi kelancaran perumusan kebijakan, pemantauan, dan evaluasi.
 3. Jumlah pegawai, terutama jabatan fungsional yang mendukung teknis penanggulangan bencana, masih terbatas. Selain itu, kompetensi aparatur dalam manajemen kebencanaan masih memerlukan peningkatan melalui pelatihan.
 4. Dengan waktu yang singkat sejak pembentukan, proses penyesuaian administrasi dan pelaksanaan anggaran APBD belum berjalan maksimal. Hal ini menghambat realisasi program pencegahan, penanganan darurat, maupun rehabilitasi.
 5. Fungsi pemantauan dan evaluasi kinerja penanggulangan bencana belum terbangun secara sistematis sehingga capaian program sulit dimonitor secara berkala.

B. Permasalahan Eksternal

1. Penanggulangan bencana membutuhkan dukungan OPD lain, terutama terkait logistik, infrastruktur, kesehatan, dan sosial. Lemahnya koordinasi awal menyebabkan keterlambatan program.
2. Prioritas fiskal daerah masih terbagi dengan sektor lain, sehingga porsi anggaran penanggulangan bencana belum sepenuhnya memadai.
3. Partisipasi masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana masih rendah, sementara kolaborasi dengan dunia usaha/swasta untuk mendukung logistik dan sarana prasarana juga belum optimal.
4. Sebagai daerah kepulauan dengan mobilitas tinggi, distribusi logistik maupun respon darurat bencana memerlukan biaya besar dan waktu lama, sehingga memengaruhi capaian program di bidang kedaruratan.
5. Proses penyesuaian kebijakan nasional dengan kondisi daerah masih memerlukan sinkronisasi, termasuk dalam penetapan standar penyelenggaraan bencana

Analisis terhadap lingkungan internal Badan Penanggulangan Bencana Daerah memperlihatkan unsur-unsur kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

a. Kekuatan (*Strength*)

1. BPBD memiliki landasan tugas dan fungsi yang diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan.
2. Adanya bidang Pencegahan, Kedaruratan dan Logistik, serta Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang memungkinkan fokus pelaksanaan pada tiap aspek penanggulangan bencana.
3. Keberadaan BPBD menunjukkan adanya komitmen Pemerintah Kota Batam untuk memperkuat manajemen bencana.
4. Sebagai pusat pertumbuhan di wilayah kepulauan, Batam relatif mudah diakses dalam hal komunikasi dan koordinasi antarwilayah.

5. Terdapat banyak organisasi masyarakat, relawan, dan lembaga swasta di Batam yang dapat dijadikan mitra dalam penanggulangan bencana.

b. Kelemahan (*weaknesses*)

1. BPBD baru berjalan efektif pada Mei 2025 sehingga belum memiliki pengalaman dan rekam jejak kinerja yang kuat.
2. Jumlah personel masih sedikit, terutama jabatan fungsional teknis kebencanaan; kompetensi aparatur masih perlu peningkatan.
3. Hingga Triwulan II, capaian program sangat rendah karena keterlambatan penyesuaian kelembagaan dan anggaran.
4. Antarbidang dan sekretariat masih dalam tahap adaptasi sehingga fungsi perencanaan, pemantauan, dan evaluasi belum berjalan baik.
5. Belum tersedia sepenuhnya peralatan tanggap darurat, gudang logistik, dan sistem informasi kebencanaan yang terintegrasi

2.3.3 Peluang dan Tantangan

Untuk pengembangan pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Batam terdapat beberapa peluang yang harus dihadapi yaitu:

- a. Adanya kebijakan BNPB dan Kemendagri yang mendorong penguatan kelembagaan BPBD di daerah.
- b. Potensi sinergi dengan OPD lain (Dinas PU, Kesehatan, Sosial, Satpol PP, Damkar) dalam pencegahan dan penanganan darurat bencana.
- c. Kota Batam sebagai kota industri memiliki banyak perusahaan yang dapat berkontribusi melalui program CSR untuk mendukung logistik dan sarana kebencanaan.
- d. Pemanfaatan aplikasi digital untuk peringatan dini, pemetaan rawan bencana, serta sistem informasi penanggulangan bencana dapat mempercepat layanan BPBD.
- e. Banyak komunitas dan relawan yang siap dilibatkan dalam upaya kesiapsiagaan, mitigasi, maupun penanganan bencana.

Di samping peluang yang dimiliki terdapat pula beberapa tantangan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Batam yaitu:

- a. Kondisi geografis kepulauan dan padatnya aktivitas industri membuat Batam rawan bencana alam (banjir, angin kencang) maupun non-alam (kebakaran industri, kecelakaan laut).
- b. Alokasi anggaran masih terbatas karena harus berbagi dengan prioritas pembangunan lain.
- c. Keberhasilan BPBD sangat dipengaruhi efektivitas kerja sama dengan OPD lain, TNI/Polri, serta lembaga vertikal.
- d. Tingkat kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana belum merata, terutama dalam hal pencegahan dan mitigasi.
- e. Perubahan iklim, peningkatan cuaca ekstrem, serta potensi krisis industri/energi dapat meningkatkan risiko bencana di Batam.

2.3.4 Isu-Isu Penting/Strategis Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan analisis kritikal, maka dapat diidentifikasi isu-isu penting terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Batam secara jelas dan rinci yang terjadi pada masing-masing bidang, sebagai berikut:

1. Isu-isu penting terkait Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
 - a. Minimnya data kebencanaan yang mutakhir;
 - b. Masih terbatasnya ketersediaan data potensi bencana di Kota Batam secara spasial maupun tematik, sehingga perencanaan pencegahan belum sepenuhnya berbasis data risiko;
 - c. Rendahnya kapasitas SDM dan masyarakat dalam penanggulangan bencana;
 - d. Tingkat pemahaman masyarakat dan aparatur mengenai upaya mitigasi, peringatan dini, dan kesiapsiagaan masih rendah, sehingga rentan terjadi kepanikan saat bencana;
 - e. Sarana prasarana peringatan dini belum optimal;
 - f. Belum tersedianya atau belum berfungsinya sistem peringatan dini (*early warning system*) secara merata di wilayah rawan bencana;
 - g. Kurangnya kolaborasi lintas sektor
 - h. Koordinasi antarpemangku kepentingan (instansi vertikal, perangkat daerah lain, TNI/Polri, relawan, dunia usaha) masih perlu diperkuat dalam penyusunan rencana kontinjensi dan simulasi penanganan bencana.
2. Isu-isu penting terkait Bidang Kedaruratan dan Logistik
 - a. Kesiapan penanganan tanggap darurat belum memadai;
 - b. Belum optimalnya SOP tanggap darurat yang disosialisasikan ke tim reaksi cepat maupun masyarakat, sehingga dapat menimbulkan keterlambatan respon awal;
 - c. Ketersediaan logistik dan peralatan penanganan darurat terbatas;
 - d. Jumlah dan jenis logistik, peralatan evakuasi, serta peralatan penanganan darurat lainnya masih terbatas dan belum merata untuk mendukung penanganan cepat di lokasi bencana;
 - e. Keterbatasan armada dan tenaga operasional;
 - f. Belum memadainya jumlah kendaraan operasional tanggap darurat dan personel yang terlatih untuk mendukung evakuasi dan distribusi logistik di lapangan;
 - g. Mekanisme pendanaan darurat masih perlu disiapkan;
 - h. Belum adanya dana siap pakai yang fleksibel untuk mendukung respon cepat bencana skala kecil hingga sedang di tingkat daerah.
3. Isu-isu penting terkait Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
 - a. Penanganan pascabencana belum terencana secara komprehensif. Rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana masih perlu disusun lebih detail agar penanganan dapat berjalan cepat, terarah, dan akuntabel;
 - b. Pendataan kerusakan dan kerugian belum terstandar. Belum optimalnya mekanisme penilaian kerusakan dan kerugian

- akibat bencana, sehingga berpengaruh pada akurasi data untuk pengajuan bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi;
- c. Koordinasi lintas sektor dan partisipasi masyarakat perlu diperkuat. Pelibatan stakeholder, termasuk swasta, dunia usaha, dan masyarakat dalam tahap pemulihan masih perlu dioptimalkan agar hasil rehabilitasi dan rekonstruksi lebih berkelanjutan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan kerangka dan langkah awal dalam menghimpun dan menyusun semua rencana kebutuhan pembangunan daerah. Sudah menjadi kewajaran apabila kebutuhan akan selalu lebih besar daripada sumber daya yang dimiliki. maka dilakukanlah seleksi terhadap rencana pembangunan untuk menuju skala prioritas rencana pembangunan hingga akhirnya disusunlah rumusan kebijakan umum anggaran berkaitan dengan arah kebijakan RKPD.

Review terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 dan rumusan kebutuhan program dan kegiatan tahun 2026 disajikan pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026
Kota Batam**

Nama Perangkat Daerah : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indukatif (Rp.)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	Catatan Penting
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		1. Nilai SAKIP PD 2. Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	73 (Nilai) 87 (Nilai)	6.340.337.715,98	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		1. Nilai SAKIP PD 2. Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	73 (Nilai) 87 (Nilai)	6.340.337.715,98	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase dokumen perencanaan , penganggaran, dan evaluasi yang tersusun sesuai dengan tahapan dan waktu	100%	6.194.500,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang tersusun sesuai dengan tahapan dan waktu	100%	6.194.500,00	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					
		Kota Batam, Semua Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	2 Dokumen	6.194.500,00		Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	6.194.500,00	

		n, Semua Kel/Desa	Daerah				Kel/Desa				
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan	100 %	4.830.966.015,98	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan	100 %	4.830.966.015,98	
2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					
		Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	49 Orang/bulan	4.800.966.015,98		Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	49 Orang/bulan	4.800.966.015,98	
3	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					
		Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	30.000.000,00		Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	30.000.000,00	
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	65 %	80.987.800,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	65 %	80.987.800,00	

4	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya					Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya					
		Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	14.737.800,00		Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	14.737.800,00	
5	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					
		Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	66.250.000,00		Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	66.250.000,00	
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100 %	251.911.500,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100 %	251.911.500,00	
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					
		Kota	Jumlah	1 Paket	10.190.100,00		Kota Batam,	Jumlah Paket	1 Paket	10.190.100,00	

		Batam, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	Paket Komponen Instalasi Listrik/Pener angan Bangunan Kantor yang Disediakan				Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor yang Disediakan			
7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					
		Kota Batam, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapa n Kantor yang Disediakan	1 Paket	57.749.200,00		Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	57.749.200,00	
8	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Penyediaan Bahan Logistik Kantor					
		Kota Batam, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	59.803.000,00		Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	59.803.000,00	
9	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					
		Kota Batam, Semua	Jumlah Paket Barang	1 Paket	19.663.200,00		Kota Batam, Semua Kecamatan,	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	1 Paket	19.663.200,00	

		Kecamatan, Semua Kel/Desa	Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				Semua Kel/Desa	yang Disediakan			
10	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					
		Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	104.506.000,00		Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	104.506.000,00	
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan	100 %	876.397.600,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan	100 %	876.397.600,00	
11	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					
		Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3 Unit	530.364.000,00		Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	530.364.000,00	

			yang Disediakan								
12	Pengadaan Mebel					Pengadaan Mebel					
		Kota Batam, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	13.089.700,00		Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	13.089.700,00	
13	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					
		Kota Batam, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	7.738.800,00		Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	7.738.800,00	
14	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					
		Kota Batam, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	253.764.000,00		Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	253.764.000,00	
15	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					
		Kota	Jumlah Unit	7 Unit	71.441.100,00		Kota Batam,	Jumlah Unit	7 Unit	71.441.100,00	

		Batam, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100 %	115.061.600,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100 %	115.061.600,00	
16	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					
		Kota Batam, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	105.258.800,00		Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	105.258.800,00	
17	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					
		Kota Batam,	Jumlah Laporan	1 Laporan	8.002.800,00		Kota Batam, Semua	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	1 Laporan	8.002.800,00	

		Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				Kecamatan, Semua Kel/Desa	Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
18	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					
		Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.800.000,00		Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.800.000,00	
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	100 %	178.818.700,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	100 %	178.818.700,00	
19	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					

		Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	11.448.700,00		Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	11.448.700,00	
20	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					
		Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	149.340.000,00		Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	149.340.000,00	
21	Pemeliharaan					Pemeliharaan					

	Peralatan dan Mesin Lainnya					Peralatan dan Mesin Lainnya					
	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	18.030.000,00		Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	18.030.000,00		
II	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1. Persentase cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan bencana 2. Persentase penanganan tanggap darurat bencana 3. Persentase penanganan pasca bencana	100 % 100 % 100 %	869.202.600,00	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		1. Persentase cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan bencana 2. Persentase penanganan tanggap darurat bencana 3. Persentase penanganan pasca bencana	100 % 100 % 100 %	869.202.600,00		
8	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pelayanan informasi rawan bencana Kota	12 Dokumen	42.439.200,00	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen pelayanan informasi rawan bencana Kota	12 Dokumen	42.439.200,00		
22	Sosialisasi,				Sosialisasi,						

	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)					Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)					
	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/ Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	100 Orang	42.439.200,00		Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/ Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	100 Orang	42.439.200,00		
9	Pelayanan		Persentase	100 %	521.150.100,00	Pelayanan		Persentase	100 %	521.150.100,00	

	Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		cakupan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan			Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		cakupan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan			
23	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam					Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam					
	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	150 Keluarga	110.806.300,00		Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	150 Keluarga	110.806.300,00		
24	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota					Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota					
	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/ Kota yang berasal dari lintas sektor yang	24 Orang	18.338.600,00		Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	24 Orang	18.338.600,00		

			memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana								
25	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota					Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota					
		Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/ Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	334.361.900,00		Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	334.361.900,00	
26	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota					Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota					
		Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua	Jumlah warga negara termasuk kelompok	50 Kawasan	57.643.300,00		Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana	50 Kawasan	57.643.300,00	

		Kel/Desa	rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/ Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana					Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana			
10	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		Persentase cakupan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 %	305.613.300,00	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		Persentase cakupan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 %	305.613.300,00	
27	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota					Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota					
		Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil	3 Dokumen	170.971.000,00		Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	3 Dokumen	170.971.000,00	

			Dokumen Laporan Kaji Cepat								
28	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota					Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota					
	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	30 Orang	92.107.300,00		Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	30 Orang	92.107.300,00		
29	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota					Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota					
	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban	12 Orang	42.535.000,00		Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban	12 Orang	42.535.000,00		

			Bencana								
	Total :			7.209.540.315,98						7.209.540.315,98	

Program : 2

Kegiatan : 10

Sub Kegiatan : 29

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam membuka akses yang luas kepada pemangku kepentingan dalam memberikan usulan pembangunan di daerahnya. Usulan rencana pembangunan dapat berasal *bottom up* yaitu usulan dari masyarakat melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) mulai dari tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Tingkat Kota Batam hingga Tingkat Provinsi. Selain itu usulan rencana pembangunan juga berasal dari usulan *top down* dari kunjungan kerja Wali Kota dan Reses DPRD.

Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat yang diusulkan oleh pemangku kepentingan berdasarkan pada hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota Batam yang mana penjaringan kebutuhan masyarakat dilakukan melalui SIPD yang diajukan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Batam. Usulan kegiatan masyarakat selanjutnya akan diverifikasi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Batam berdasarkan syarat teknis yang telah ditentukan. Selanjutnya akan ditentukan usulan prioritas yang dapat diakomodir oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Batam sesuai dengan skala prioritas dan kebutuhan serta anggaran. Adapun tabel hasil kajian usulan program dan kegiatan masyarakat tahun 2026 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.4 Usulan Program dan Kegiatan
dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Kota Batam**

Nama Perangkat Daerah :

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
		N	H	L	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan nasional merupakan upaya semua komponen bangsa yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berdasarkan Pancasila. Pencapaian tujuan ini dilaksanakan secara bertahap, mulai dari jangka panjang, jangka menengah, hingga tahunan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025–2045 menggariskan Visi Indonesia Tahun 2045, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan yang pelaksanaannya dibagi ke dalam 4 (empat) tahap Pembangunan jangka menengah. Pembangunan tahun 2026 berada pada tahap jangka menengah yang pertama yang arahnya digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 dengan Visi Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045.

RPJMN 2025–2029 dirancang untuk mewujudkan 8 misi besar, yang dikenal sebagai Asta Cita:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro-maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi
4. Memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

RPJMN 2025–2029 melalui Asta Cita menekankan arah pembangunan nasional yang salah satunya berkaitan langsung dengan ketahanan daerah terhadap bencana, pelestarian lingkungan, tata kelola pemerintahan yang baik, dan pemerataan pembangunan wilayah.

Sementara itu, Kota Batam menghadapi isu strategis berupa kerentanan wilayah akibat pesatnya pembangunan, degradasi lingkungan, pengelolaan sampah yang belum optimal, serta potensi bencana akibat *human error* maupun aktivitas pembangunan.

Dalam konteks ini, BPBD Kota Batam memiliki peran krusial dalam memastikan penyelarasan antara prioritas nasional dengan kebutuhan daerah. Fungsi BPBD, mulai dari perumusan kebijakan, pemetaan risiko bencana, penyusunan prosedur tetap, hingga rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, menjadi instrumen operasional untuk mewujudkan arah pembangunan nasional sekaligus menjawab isu-isu strategis daerah.

Dengan demikian, penyandingan dapat dilihat sebagai berikut: pembangunan nasional melalui Asta Cita menuntut peningkatan resiliensi dan mitigasi bencana (nasional), yang di tingkat Kota Batam diterjemahkan dalam isu strategis seperti pengelolaan sampah, kerusakan lingkungan, dan ancaman bencana akibat aktivitas manusia. Selanjutnya, implementasinya berada di tangan BPBD melalui kebijakan, pemantauan, evaluasi, serta koordinasi penanggulangan bencana yang menyeluruh.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang kebencanaan maka keluaran (*output*) kegiatan yang dihasilkan adalah berupa dokumen kebijakan penanggulangan bencana daerah, peta rawan bencana, standar operasional prosedur penanganan bencana, peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia, terselenggaranya kegiatan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, penanganan darurat, serta rehabilitasi dan rekonstruksi, serta tersedianya sistem informasi dan pelaporan kebencanaan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Berdasarkan hal tersebut tentunya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Batam secara spesifik berada pada kebijakan dan prioritas pembangunan nasional.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 mengacu pada tujuan dan sasaran Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025 – 2029. Adapun tujuan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Meningkatkan kualitas ketangguhan dan tanggap bencana daerah.

Sedangkan sasaran dalam mencapai tujuan tersebut mengacu pada Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025 – 2029. adalah sebagai berikut:

- Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintahan
- Terwujudnya ketahanan daerah yang tangguh

Dalam mencapai tujuan dan sasaran tersebut, target tujuan dan sasaran yang ditetapkan pada Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2026 mengacu pada Renstra PD Tahun 2025 – 2029. sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini.

**Tabel 3.1 Target Tujuan dan Sasaran
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2026**

No.	Tujuan/Sasaran PD	Indikator Tujuan/Sasaran PD	Target 2026
1	Meningkatkan kualitas ketangguhan dan tanggap bencana daerah	Indeks Risiko Bencana	100,96
2	Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Kebencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah	75
3	Terwujudnya ketahanan daerah yang tangguh	Indeks Ketahanan Daerah	0,29

3.3 Program dan Kegiatan

Dalam merumuskan program dan kegiatan tahun 2026 mengacu pada pencapaian visi misi Kepala Daerah yang termuat dalam RPJMD Kota Batam 2025 – 2029. yang dirinci dalam Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025 – 2029. Perumusan program dan kegiatan ini dalam rangka mendukung pencapaian Misi 5: Menjaga kelestarian budaya dan lingkungan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan Kota Batam Tahun 2025 – 2029. Dalam dokumen RPJMD tersebut telah dijabarkan indikator dan target capaian tiap tahun yang harus dicapai dengan program dan kegiatan tertentu.

Tahun 2026 Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengusulkan 2 program, 10 kegiatan, 29 sub kegiatan, dengan kebutuhan dana sebesar Rp. 7.209.540.315,98 (tujuh miliar dua ratus sembilan juta lima ratus empat puluh ribu tiga ratus lima belas koma sembilan puluh delapan rupiah). Adapun program dan kegiatan yang disusulkan adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
 - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
 - 2) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - 3) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
 - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
 - 4) Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya;
 - 5) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;
 - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah.
 - 6) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - 7) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - 8) Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - 9) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
 - 10) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;

- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
 - 11) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - 12) Pengadaan Mebel;
 - 13) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - 14) Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
 - 15) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
 - f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - 16) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - 17) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - 18) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
 - g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - 19) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - 20) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - 21) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
2. Program Penanggulangan Bencana
- a. Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota.
 - 22) Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana);
 - b. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana.
 - 23) Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam;
 - 24) Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota;
 - 25) Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota;
 - 26) Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota;
 - c. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana.
 - 27) Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota;
 - 28) Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota;
 - 29) Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota.

Tabel 3.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiran Maju Tahun 2027

Nama Perangkat Daerah : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Batam

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2027)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Renstra)
	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				7.209.540.315,98				18.139.285.407
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				7.209.540.315,98				18.139.285.407
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				7.209.540.315,98				18.139.285.407
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Nilai SAKIP PD 2. Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD		73 (Nilai) 87 (Nilai)	6.340.337.715,98			75 (Nilai) 88 (Nilai)	15,787,302,487.00
1	Perencanaan, Penganggaran, dan	Persentase dokumen		100%	6.194.500,00			100%	48,330,000.00

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakirana Maju Rencana Tahun 2027)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Renstra)
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang tersusun sesuai dengan tahapan dan waktu							
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Batam, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	2 Dokumen	6.194.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Dokumen	48,330,000,00
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan		100 %	4.830.966.015,98			100 %	12,033,330,000.00

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakirana Maju Rencana Tahun 2027)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Renstra)
2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Batam, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	49 Orang/bulan	4.800.966.015,98	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)		79 Orang/bulan	12,000,000,000.00	
3	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN								
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Batam, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	12 Dokumen	30.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Dokumen	33,330,000,00	
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Percentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya		65 %	80.987.800,00			70 %	230,752,947,00
4	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya								

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakirana Maju Rencana Tahun 2027)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Renstra)
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kota Batam, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	1 Paket	14.737.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Paket	164,502,947.00
5	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi								
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kota Batam, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	10 Orang	66.250.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10 Orang	66,250,000.00
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran		100 %	251.911.500,00			100 %	210,035,540.00
6	Penyediaan Komponen Instalasi								

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakirana Maju Rencana Tahun 2027)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Renstra)
	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Batam, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	1 Paket	10.190.100,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Paket	11,082,500.00
7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Batam, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	1 Paket	57.749.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Paket	51,228,750.00
8	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
		Jumlah Paket Bahan Logistik	Kota Batam, Semua	4 Paket	59.803.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5 Paket	10,000,000.00

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakirana Maju Rencana Tahun 2027)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Renstra)
		Kantor yang Disediakan	Kecamatan , Semua Kel/Desa						
9	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Batam, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	1 Paket	19.663.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Paket	21,889,890.00
10	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Batam, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	12 Laporan	104.506.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	115,834,400.00
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan barang milik		100 %	876.397.600,00			100 %	1,747,264,000.00

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakirana Maju Rencana Tahun 2027)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Renstra)
		daerah sesuai rencana kebutuhan							
11	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kota Batam, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	3 Unit	530.364.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5 Unit	1,141,916,600.00
12	Pengadaan Mebel								
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kota Batam, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	2 Unit	13.089.700,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		146 Unit	255,361,000.00
13	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
		Jumlah Unit Peralatan	Kota Batam,	1 Unit	7.738.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH		26 Unit	77,000,000.00

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakirana Maju Rencana Tahun 2027)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Renstra)
		dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa			(PAD)			
14	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kota Batam, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	1 Unit	253.764.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Unit	253,764,000.00
15	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kota Batam, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	7 Unit	71.441.100,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7 Unit	9,222,400.00
6	Penyediaan Jasa	Persentase		100 %	115.061.600,00			100 %	1,240,250,000.00

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakirana Maju Rencana Tahun 2027)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Renstra)
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan							
16	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Batam, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	12 Laporan	105.258.800,00	PENDAPATAN BAGI HASIL		12 Laporan	107,030,000.00
17	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	Kota Batam, Semua Kecamatan	1 Laporan	8.002.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	39,600,000.00

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakirana Maju Rencana Tahun 2027)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Renstra)
		Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	, Semua Kel/Desa						
18	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Batam, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	12 Laporan	1.800.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	1,093,620,000,00
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik		100 %	178.818.700,00			100 %	277,340,000,00
19	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan								

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakirana Maju Rencana Tahun 2027)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Renstra)
	Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Batam, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	1 Unit	11.448.700,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Unit	42,040,000.00	
20	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Batam, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	3 Unit	149.340.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6 Unit	163,300,000.00	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakirana Maju Rencana Tahun 2027)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Renstra)
		yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya							
21	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Batam, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	15 Unit	18.030.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		15 Unit	34,000,000.00
II	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1. Persentase cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan bencana 2. Persentase penanganan tanggap		100 % 100 % 100 %	869.202.600,00			100 % 100 % 100 %	2,351,982,920.00

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2027)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Renstra)
		darurat bencana 3. Persentase penanganan pasca bencana							
8	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pelayanan informasi rawan bencana Kota		12 Dokumen	42.439.200,00			12 Dokumen	47,311,000.00
22	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)								
		Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan	Kota Batam, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	100 Orang	42.439.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 Orang	47,311,000.00

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakirana Maju Rencana Tahun 2027)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Renstra)
		rawan bencana bencana Kabupaten/ Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun							
9	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Percentase cakupan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaa n		100 %	521.150.100,00			100 %	1,728,857,820,00
23	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam								

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakirana Maju Rencana Tahun 2027)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Renstra)
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Kota Batam, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	150 Keluarga	110.806.300,00	PENDAPATAN BAGI HASIL		150 Keluarga	121,561,000.00
24	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota								
		Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/ Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi	Kota Batam, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	24 Orang	18.338.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		24 Orang	20,576,820.00

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakirana Maju Rencana Tahun 2027)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Renstra)
		untuk penanganan awal darurat bencana							
25	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota								
		Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/ Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Kota Batam, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	1 Dokumen	334.361.900,00	PENDAPATAN BAGI HASIL		1 Dokumen	369,273,000.00
26	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana								

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakirana Maju Rencana Tahun 2027)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Renstra)
	Kabupaten/Kota								
		Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/ Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	Kota Batam, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	50 Kawasan	57.643.300,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		64 Kawasan	111,174,000.00
10	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase cakupan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana		100 %	305.613.300,00			100 %	324,314,100.00
27	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota								

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakirana Maju Rencana Tahun 2027)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Renstra)
		Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	Kota Batam, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	3 Dokumen	170.971.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Dokumen	2,750,000.00
28	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota								
		Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis	Kota Batam, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	30 Orang	92.107.300,00	PENDAPATAN BAGI HASIL		35 Orang	79,872,100.00

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakirana Maju Rencana Tahun 2027)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Renstra)
		Kejadian Bencana							
29	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota								
		Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Kota Batam, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	12 Orang	42.535.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Orang	239,492,000,00
TOTAL				7.209.540.315,98					18.139.285.407

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Batam pada perencanaan tahun 2026 merupakan tahun ke-2 dalam Renstra Tahun 2025 – 2029. Adapun rencana kerja untuk mendukung tugas dan fungsi serta merealisasikan visi dan misi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Batam untuk Tahun 2026 melaksanakan 2 (dua) program, 10 (sepuluh) kegiatan dengan 29 (dua puluh sembilan) jenis sub kegiatan beserta usulan pendanaan pagu indikatif tersaji dalam tabel berikut:

**Tabel 3.3 Program dan Kegiatan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Batam Tahun 2026**

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		BADAN PENANGGULANGAN			7.209.540.315,98							18,139,285,407,00		
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB			7.209.540.315,98							18,139,285,407,00		
1	05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG			7.209.540.315,98							18,139,285,407,00		
104	1 05 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Nilai SAKIP PD 2. Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	73 (Nilai) 87 (Nilai)	6.340.337.715,98							75 (Nilai) 88 (Nilai)	15,787,302,487,00	
	1 05 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang tersusun sesuai dengan tahapan dan waktu	100%	6.194.500,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	ASN Badan Penanggulangan Bencana Daerah	100%	48,330,000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1 05 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	6.194.500,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	ASN Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3 Dokumen	48,330,000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1 05 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan	100 %	4.830.966.015,98			-	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	ASN Badan Penanggulangan Bencana Daerah	100%	12,033,330,000,00		
	1 05 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	49 Orang/bulan	4.800.966.015,98	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	ASN Badan Penanggulangan Bencana Daerah	79 Orang/bulan	12,000,000,000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1 05 01 2.02 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	30.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	ASN Badan Penanggulangan Bencana Daerah	12 Dokumen	33,330,000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1 05 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	65 %	80.987.800,00			-	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	ASN Badan Penanggulangan Bencana Daerah	70%	230,752,947,00		
	1 05 01 2.05 0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	14.737.800,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	ASN Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1 Paket	164,502,947,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1 05 01 2.05 0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	66.250.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing	ASN Badan Penanggulangan Bencana Daerah	10 Orang	66,250,000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	

No	Kode		Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Nasional	Daerah	Target	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
	1	05 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Percentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100 %	251.911.500,00			-	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	ASN Badan Penanggulangan Bencana Daerah	100%	210,035,540,00			
	1	05 01 2.06	0001 Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.190.100,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	ASN Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1 Paket	11,082,500,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
	1	05 01 2.06	0002 Penyediaan Peralatan dan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	57.749.200,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	ASN Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1 Paket	51,228,750,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
	1	05 01 2.06	0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	59.803.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	ASN Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5 Paket	10,000,000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
	1	05 01 2.06	0005 Penyediaan Barang Cetakan dan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	19.663.200,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	ASN Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1 Paket	21,889,890,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
	1	05 01 2.06	0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	104.506.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing	ASN Badan Penanggulangan Bencana Daerah	12 Laporan	115,834,400,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
	1	05 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Percentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan	100 %	876.397.600,00			-	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	ASN Badan Penanggulangan Bencana Daerah	100%	1,747,264,000,00			
	1	05 01 2.07	0002 Pengadaan Kendaraan Dinas	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	530.364.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	ASN Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5 Unit	1,141,916,600,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
	1	05 01 2.07	0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	13.089.700,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	ASN Badan Penanggulangan Bencana Daerah	146 Unit	255,361,000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
	1	05 01 2.07	0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	7.738.800,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	ASN Badan Penanggulangan Bencana Daerah	26 Unit	77,000,000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
	1	05 01 2.07	0009 Pengadaan Gedung Kantor atau	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	253.764.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	ASN Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1 Unit	253,764,000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)			
								Nasional	Daerah							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	05 01 2.07	0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	7 Unit	71.441.100,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	ASN Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7 Unit	9,222,400,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			
1	05 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100 %	115.061.600,00			-	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	ASN Badan Penanggulangan Bencana Daerah	100%	1,240,250,000,00				
1	05 01 2.08	0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	105.258.800,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	ASN Badan Penanggulangan Bencana Daerah	12 Laporan	107,030,000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			
1	05 01 2.08	0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	8.002.800,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	ASN Badan Penanggulangan Bencana Daerah	12 Laporan	39,600,000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			
1	05 01 2.08	0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.800.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	ASN Badan Penanggulangan Bencana Daerah	12 Laporan	1,093,620,000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			
1	05 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	100 %	178.818.700,00			-	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	ASN Badan Penanggulangan Bencana Daerah	100%	277,340,000,00				
1	05 01 2.09	0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dimas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	11.448.700,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	ASN Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1 Unit	42,040,000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			
1	05 01 2.09	0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	149.340.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	ASN Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6 Unit	163,300,000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			
1	05 01 2.09	0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	18.030.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	ASN Badan Penanggulangan Bencana Daerah	15 Unit	34,000,000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			
105	1 05 03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1. Persentase cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan bencana 2. Persentase penanganan tanggap darurat bencana 3. Persentase penanganan pasca bencana	100 % 100 % 100 %	869.202.600,00						100 % 100 % 100 %	2,351,982,920,00				
	1 05 03 2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pelayanan informasi rawan bencana Kota	12 Dokumen	42.439.200,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing	Masyarakat	12 Dokumen	47,311,000,00				
1	05 03 2.01	0007 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	100 Orang	42.439.200,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing	Masyarakat	100 Orang	47,311,000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)						
								Nasional	Daerah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	05	03	2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase cakupan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan	100 %	521.150.100,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing	Masyarakat	100%	1,728,857,820,00			
1	05	03	2.02	0019 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	150 Keluarga	110.806.300,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	1. Peningkatan kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing	Masyarakat	150 Keluarga	121,561,000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
1	05	03	2.02	0021 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi	Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	24 Orang	18.338.600,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Masyarakat	24 Orang	20,576,820,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
1	05	03	2.02	0027 Penyusunan Rencana	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	334.361.900,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Masyarakat	1 Dokumen	369,273,000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
1	05	03	2.02	0028 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	50 Kawasan	57.643.300,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing	Masyarakat	100 Kawasan	111,174,000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
1	05	03	2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase cakupan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 %	305.613.300,00			-	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Masyarakat	100%	324,314,100,00			
1	05	03	2.03	0002 Respon Cepat Darurat Bencana	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	3 Dokumen	170.971.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Masyarakat	3 Dokumen	2,750,000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
1	05	03	2.03	0003 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	30 Orang	92.107.300,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Masyarakat	35 Orang	79,872,100,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
1	05	03	2.03	0009 Penyediaan Logistik Penyelamatan	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	12 Orang	42.535.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Masyarakat	12 Orang	239,492,000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		

BAB V **PENUTUP**

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Batam merupakan dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Batam pada Tahun 2026 khususnya dan pembangunan tahunan daerah pada umumnya, serta didasarkan pada lintas program melalui mekanisme yang partisipatif, transparan, akuntabel, efektif dan efisien dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kota Batam yang menjadi tanggung jawab Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Batam.

Sebagai dokumen rencana resmi daerah, diharapkan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Batam Tahun 2026 dapat dipedomani dan direalisasikan oleh aparatur pelaksana program/kegiatan dengan tetap memperhatikan prinsip efektifitas, akuntabilitas dan efisiensi kinerja, baik dari segi fisik maupun penganggarannya.

5.1 Catatan Penting

Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Batam Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun. Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Batam Tahun 2026 disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2026 dan berpedoman pada Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025 – 2029 serta berfungsi sebagai panduan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2026), perencanaan teknis operasional tahunan yang disusun berdasarkan arah kebijakan RPJMD Kota Batam Tahun 2025 – 2029.

Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Batam Tahun 2026 memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan. Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Batam Tahun 2026 terdiri atas 2program, 10 kegiatan dan 29 sub kegiatan. Dokumen Renja ini selanjutnya menjadi pedoman bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2026.

Jika dalam proses perkembangannya pelaksanaan program/kegiatan terjadi perubahan disebabkan adanya perubahan seperti: kerangka ekonomi dan keuangan daerah, target sasaran pembangunan daerah, prioritas pembangunan daerah, penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan perangkat daerah, dan target kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dasar Perubahan RKPD Tahun 2026 maka akan dilakukan perubahan Renja Tahun 2026.

5.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Penyusunan program dan kegiatan pembangunan di dalam Renja ini bertujuan untuk meningkatkan perencanaan pembangunan yang berkualitas. Program dan kegiatan yang direncanakan bertujuan untuk mencapai sasaran-sasaran strategis yang tertuang dalam Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Batam Tahun 2025 – 2029 yang di dalam pelaksanaannya harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi,

efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Beberapa kaidah-kaidah pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

1. Renja Perangkat Daerah menjadi dasar bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan Tahun 2026 yang dalam proses penyusunannya harus memperhatikan/mempedomani hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan dan dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya (RPJMN, RKPD Provinsi, RPJPD Kota, RPJMD Kota, RKPD Kota Batam dan Renstra Perangkat Daerah).
2. Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Batam Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang menjadi dasar dalam sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kota, APBD Provinsi maupun yang bersumber dari APBN

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Program dan kegiatan pada Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2026 yang direncanakan merupakan prioritas dalam rangka mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan daerah jangka menengah, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan harus tepat waktu sesuai amanat peraturan perundungan yang berlaku;
2. Peningkatan pemahaman dan komitmen seluruh aparatur Pemerintah Kota Batam terhadap perencanaan dan pelaksanaan seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Tahun 2026 dengan efektif dan efisien;
3. Adanya peningkatan kapasitas SDM aparatur untuk melaksanakan tugas yang semakin kompleks dengan upaya melalui pendidikan formal, bimtek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur baik melalui luring maupun daring;
4. Dalam menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integrasi, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Batam, maka seluruh aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Batam secara berjenjang, bertanggung jawab dan wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Renja Tahun 2026.

Demikian Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Batam Tahun 2026 yang telah kami susun, semoga dapat bermanfaat bagi peningkatan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Batam dalam pelayanan pada masyarakat.

WALI KOTA BATAM



AMSAKAR ACHMAD

73